

Muhiyo Job & Education Fair Tawarkan 367 Lowker

YOGYA (KR) - SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta (Muhiyo) menggelar Job & Education Fair 2023 bertema 'Get Your Best Career for a Better Future', Rabu-Kamis (8-9/11) dengan menghadirkan 15 mitra Industri dan perguruan tinggi di Yogyakarta. Sebanyak 367 lowongan pekerjaan (lowker) disiapkan untuk para lulusan SMK bidang teknologi infor-

masi, ekonomi kreatif, jasa, perbankan, dan bidang penyiaran. Kepala SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta Widi Astuti SPd MPd memaparkan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, utamanya siswa dan alumni yang tengah mencari lowongan pekerjaan atau yang hendak melanjutkan ke perguruan tinggi di Yogyakarta.

"Dari lowongan pekerjaan yang dibuka, ada 367 jenis dan jumlah posisi kerjanya ada sepuluh jenis. Ini sangat luar biasa, sehingga kami berharap agar para alumni dan masyarakat umum bisa mengambil kesempatan emas ini," kata Widi Astuti.

Menurutnya, lulusan SMK bisa bekerja, kuliah dan berwirausaha. Ia pun mendo-

rong agar siswa SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta dapat memilih dari tiga pilihan tersebut. "Sekolah kami menjembatani itu semua, kami memberikan fasilitas kepada para siswa dan alumni melalui

kegiatan hari ini agar mereka punya pandangan ke depan, mau bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil berwirausaha," ungkap Widi.

Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pen-

didikan Non Formal, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY Achmad Muhammad MAG menuturkan, dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah Muhammadiyah, kecerdasan emosional, spiritual dan sosial

terintegrasi dalam nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah-an. Sehingga penguatan budaya yang berbasis Islam ini menjadi kriteria sekolah unggul di sekolah Muhammadiyah. (Dev)-f

BANK BPD DIY

PEMBERITAHUAN

Downtime Layanan ATM, CMS, Mobile Banking Laku Pandai, EDC dan QUAT

Dalam rangka peningkatan kualitas sarana pendukung operasional, Bank BPD DIY akan melakukan proses *maintenance system* dan *hardware*. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diinformasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Proses *maintenance system* dan *hardware* akan dilaksanakan pada:
 - Hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 00.00 - 02.00 WIB
 - Hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 00.00 - 02.00 WIB
- Dalam kurun waktu tersebut layanan ATM, Cash Management System (CMS), Mobile Banking, Laku Pandai, EDC dan BPD DIY QUAT untuk sementara waktu tidak dapat digunakan (*offline*).

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk menjadikan maklum.

Yogyakarta, 10 November 2023

Ttd.

Direksi

Bank BPD DIY berizin dan diawasi OJK
Bank BPD DIY merupakan peserta penjaminan LPS

DPDRD KOTA YOGYAKARTA

SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

KENDARAAN DINAS KELURAHAN TERAKOMODASI Dukung Operasional Lurah, Sukseskan Agenda Wilayah

YOGYA (KR) - Upaya mengawal kendaraan dinas bagi aparaturnya kelurahan di Kota Yogya akhirnya berbuah manis. Melalui APBD Perubahan tahun ini, pengadaan kendaraan dinas berupa sepeda motor sudah digulirkan. Kendaraan tersebut diharapkan mampu mendukung operasional kinerja lurah sekaligus sukseskan agenda di wilayah.

Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogyakarta Dwi Candra Putra SP, mengucapkan terima kasih kepada jajaran eksekutif atau Pemkot Yogya atas pengadaan kendaraan dinas kelurahan tersebut.

"Sebenarnya sejak tahun lalu ini kita kawal namun sempat ada evaluasi hingga akhirnya pada perubahan anggaran tahun ini bisa direalisasikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Pemkot Yogya yang sudah mengalokasikan," ujarnya.

Kendaraan dinas operasional bagi aparaturnya di lingkungan Pemkot Yogya sebetulnya juga sudah diatur melalui Perwal 46/2023. Wujudnya berupa unit sepeda motor dengan spesifikasi minimal 150 CC. Sedangkan yang diakomodasi pada akhir tahun ini berjenis Honda Vario untuk total ada 45 lurah yang ada di Kota

Dwi Candra Putra SP
Fraksi Partai NasDem



KR-Istimewa

Yogya.

"Sekarang sedang dalam proses pengadaan, dan dalam waktu dekat akan didistribusikan ke masing-masing lurah," imbuhnya.

Candra menyampaikan, tanpa kendaraan dinas bukan berarti para lurah di Kota Yogya tidak mampu menjangkauarganya. Akan tetapi jika masing-masing dibekali kendaraan dinas operasional maka menambah tanggungjawab dan motivasi yang bakal memacu kinerja. Apalagi agenda wilayah yang paling dekat saat ini ialah menyambut hajat Pemilu 2024 yang dipastikan akan meningkatkan aktivitas di tiap wilayah.

Oleh karena itu, kinerja para lurah sangat dibutuhkan dalam menjamin jalannya penyelenggaraan Pemilu 2024. Terutama menyangkut kondusivitas lingkungan hingga kepedulian serta keterlibatan masyarakat dalam mengawal dan sukseskan setiap tahapan pemilu. "Artinya, dukungan kendaraan operasional yang diberikan Pemkot harus betul-betul dimanfaatkan untuk memacu kinerja. Sekarang mulai menghadapi Pemilu 2024, dan harus kita sukseskan bersama. Termasuk peran dari para lurah," tandasnya. (Dhi)-f

MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DPDRD KOTA YOGYAKARTA

KOMISI C DPDRD KOTA YOGYAKARTA

Sepanjang Prosedural, Dukung Penuh Kemandirian Kelola Sampah



KR-Ardhi Wahdan

Ketua Komisi C (kiri) bersama jajaran mendengarkan penjabaran mitra kerja.



KR-Ardhi Wahdan

Jajaran anggota Komisi C mencermati usulan kegiatan mitra kerja eksekutif.



KR-Ardhi Wahdan

DLH sebagai salah satu mitra kerja Komisi C menyampaikan paparan.

YOGYA (KR) - Memasuki akhir tahun ini persoalan sampah masih menjadi salah satu pokok pembahasan di jajaran legislatif. Salah satunya Komisi C DPRD Kota Yogyakarta yang siap memberikan dukungan penuh dalam kemandirian pengelolaan sampah di Kota Yogya. Dengan catatan, usulan yang disampaikan sesuai prosedur atau tata kala dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komisi C sebagai salah satu alat kelengkapan dewan memiliki ketugasan pengawasan dan pendampingan terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya sebagai mitra kerja. Ketugasan DLH Kota Yogya yang mengurus persampahan pun tak luput dari pengawasan serta pendampingan. "Hari ini (kemarin) bersamaan dengan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun 2024 kami mengundang beberapa mitra kerja komisi. Salah satunya ialah DLH Kota Yogya untuk mencermati program di tahun depan. Terutama kebutuhan yang direncanakan untuk pengelolaan sampah," urai Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Ririk Banowati Permanasari, di sela memimpin rapat yang digelar di gedung dewan, Kamis (9/11).

Menurutnya sejak pertengahan tahun ketika terjadi darurat sampah akibat penutupan TPA Piyungan, masyarakat di Kota Yogya langsung terkena imbasnya. Apalagi saat itu penggerak tidak beroperasi dan depo sampah terpaksa ditutup akibat sudah overload oleh sampah. Gerakan pengelolaan sampah yang sudah dirintis sejak awal tahun pun belum mampu menjadi solusi.

Begitu pula ketika dilakukan pembukaan depo se-

cara terbatas, antrean masyarakat yang hendak membuang sampahnya secara tertib tidak terhindarkan. Belum lagi pembuangan sampah liar yang turut menjadi persoalan baru, baik yang dibuang di sungai, pinggir jalan hingga pekarangan kosong. Persoalan itu akan selalu berulang ketika belum ada kemampuan untuk mandiri sampah atau ketergantungan terhadap TPA Piyungan masih tinggi.

Oleh karena itu Komisi C DPRD Kota Yogyakarta baik melalui perubahan anggaran tahun ini maupun rencana anggaran tahun depan, selalu memberikan dukungan besar terhadap pengelolaan sampah. Hampir semua usulan anggaran yang disampaikan oleh tim eksekutif tidak pernah tertunda untuk disetujui sepanjang memiliki output yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Mulai dari perbaruan armada, pengadaan alat pengolah sampah, perbaikan TPS 3R Nitikan dan TPST Karangmiri hingga pembangunan TPS 3R baru. "Kami pantau terus kendala apa yang dihadapi oleh DLH Kota Yogya. Kemudian kebutuhan untuk mendukung program pengolahan sampah juga pasti kami setujui. Istilahnya, kalau untuk penanganan sampah kami semua memberikan keleluasaan. Tetapi harus sesuai prosedur, tata kala dan mengedepankan unsur kehati-hatian," imbuh Ririk.

Selain itu dirinya juga berharap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah seharusnya selalu dikomunikasikan dengan Komisi C. Hal ini agar proses pengawasan dan pendampingannya dapat dilakukan secara optimal. Seperti rencana Pemkot Yogya yang hendak melibatkan ka-

langan swasta dalam pengolahan sampah. Sejak awal rencana itu belum pernah dikordinasikan namun pihaknya justru mendapat informasi dari pemberitaan media jika sudah dilakukan MoU dengan perusahaan swasta.

Skema kerja sama dengan pihak swasta seharusnya dibahas secara mendalam. Hal ini agar jangan sampai hanya menguntungkan salah satu pihak saja. "Kerja sama itu kan harusnya menguntungkan kedua belah pihak. Makanya seharusnya skemanya dimatangkan dulu baru ada MoU. Ketika tiba-tiba sudah ada MoU kemudian business to business (B2B) baru dibahas kemudian, nanti titik temunya bagaimana," tanyanya.

Sebagai perbandingan, biaya yang disetorkan Pemkot Yogya ke Pemda DIY untuk menaruh sampah di TPA Piyungan mencapai Rp 25.000 per ton. Kemudian pada tahun depan retribusi tersebut naik tiga kali lipat menjadi Rp 75.000 per ton. Dari aspek politik anggaran, kebutuhan biaya pada tahun depan tidak sedikit. Sehingga jika ada pelibatan swasta, perlu ada kejelasan sejak awal terhadap pembiayaan. Apalagi tarif yang dipatok oleh swasta biasanya lebih tinggi dibanding pemerintah. Benar saja, dalam rencana yang diusulkan, anggaran untuk pihak swasta tersebut dipatok Rp 400.000 per ton atau Rp 12 miliar untuk 300 hari kegiatan.

Sorotan juga disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Affan Baskara Patria. Menurutnya dasar tarif Rp 400.000 per ton untuk pihak swasta seharusnya dibahas sejak awal. Hal ini supaya fungsi pengawasan bisa berjalan optimal. Jika ternyata itu nantinya membebani APBD

hingga harus merelokasi kegiatan lain maka perlu ada pertanggungjawaban. "Kami berharap fungsi pengawasan bisa berjalan dengan baik. Seharusnya kan sejak awal dibahas bersama. Kenapa perusahaan itu yang dipilih, seperti apa kerjanya, bagaimana teknologi dan cara kerjanya, hasil pengolahannya seperti apa. Kemudian jika nanti tidak sesuai harapan, lantas kontraprestasinya seperti apa. Jangan kemudian tiba-tiba dimunculkan. Langkah kehati-hatian ini yang perlu dikedepankan," paparnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Sigit Wicaksono, juga menyototi perihal rencana B2B pengolahan sampah. Menurutnya, urusan sampah merupakan pelayanan bukan mengejar sektor keuntungan. Pelibatan pihak swasta atau perusahaan cenderung lebih mengedepankan keuntungan. "Pengolahan sampah itu kan sebetulnya hanya berkaitan dengan teknologi. Saya yakin pemerintah sebetulnya mampu untuk mengadakan teknologi. Perkara biayanya besar, itu kan juga akan dipakai seterusnya, karena sampah ini selalu ada terus. Ya masak pemerintah tergantung dengan swasta," urainya.

Oleh karena itu Sigit mengusulkan supaya dibentuk perusahaan atau BLUD yang khusus menangani pengolahan sampah. Hal ini agar fungsi pemerintah dalam melayani masyarakat benar-benar dibuktikan. Pasalnya jika anggaran membengkak untuk pembiayaan ke perusahaan, masyarakat juga yang pada akhirnya harus menanggung. Mulai dari berkurangnya program kegiatan yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat maupun besaran pajak atau retribusi yang bakal dinaikkan. (Dhi)-f